

BULETIN PARLEMENTARIA



NOMOR: 882/I/X/2015

PIMPINAN DPR PROAKTIF KUNJUNGI KORBAN MINA



**DIVESTASI SAHAM
FREEPORT
HARUS DIAMBIL
PEMERINTAH**



**PEMERINTAH HARUS
TETAPAN
BENCANA NASIONAL
KABUT ASAP**

Jangan lewatkan
info DPR terkini
dan live streaming
TV Parlemen di
www.dpr.go.id



Pimpinan DPR Proaktif Kunjungi Korban Mina



Pimpinan DPR RI didampingi Ketua BKSAP dan Ketua F-PKS DPR memberikan keterangan pers usai memenuhi undangan Haji dari Kerajaan Arab Saudi

Pimpinan DPR RI, Setya Novanto dan Fadli Zon beserta anggota DPR RI Jazuli Juwaini dan Nurhayati Ali Assegaf melaksanakan ibadah haji atas undangan resmi kerajaan Arab Saudi kepada seluruh pemimpin di dunia, termasuk Indonesia. Meski demikian karena fungsi pengawasan yang diemban oleh seluruh anggota dewan, maka Pimpinan DPR proaktif untuk meninjau dan bertemu langsung jemaah haji asal Indonesia terutama yang menjadi korban tragedi Mina.

“Pimpinan DPR RI melakukan kunjungan ke Arab Saudi ada dua alasan, pertama kunjungan Tim pengawas haji yang saya pimpin sendiri bersama Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay. Dan kunjungan atas undangan resmi dari Raja Salman yang dipimpin oleh Pimpinan DPR RI, Setya Novanto, Fadli Zon, dan Jazuli Juwaini serta Nurhayati Ali Assegaf. Ini adalah fungsi politik,

kerjasama diplomatik untuk saling mengunjungi,” ungkap Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah saat membuka jumpa pers nya di Press Room, Rabu (30/9).

Meski demikian, dijelaskan Fahri, di pundak setiap anggota DPR melekat fungsi pengawasan. Karena ibadah haji ini melibatkan banyak masyarakat Indonesia yang notabene menjadi jemaah haji dengan jumlah terbesar di dunia. Begitu juga dengan jumlah anggaran di dalamnya yang mencapai 7-9 triliun. Atas dasar itulah maka Pimpinan DPR berinisiatif untuk bertemu langsung jemaah haji Indonesia. Terlebih lagi, pada pelaksanaan haji tahun ini terjadi musibah jatuhnya crane dan tragedi Mina.

Pada kesempatan itu Ketua DPR RI, Setya Novanto menceritakan perjuangannya saat ingin mengunjungi jemaah haji Indonesia di maktab-maktab. Bahkan pimpinan DPR juga berusaha

menerobos tentara Saudi dan petugas ketika akan memasuki Rumah Sakit Emergency Mina. Disana Pimpinan DPR bertemu beberapa jemaah haji Indonesia yang belum mendapat pertolongan.

“Sebagai jemaah haji pemilik kuota terbesar, Indonesia berhak mendapat informasi se jelas-jelasnya terkait tragedi Mina, baik itu penyebab, dan informasi terkait jumlah jemaah haji asal Indonesia yang menjadi korban,” tegas Novanto.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai pemerintah Arab Saudi lamban dalam mengidentifikasi korban. Salah satu penyebabnya menurutnya karena kekurangan tenaga ahli forensik yang mengidentifikasi korban. Oleh karena itu Fadli dan Fahri berharap agar pemerintah segera mengirimkan tenaga forensik ke Arab Saudi untuk membantu proses identifikasi. (AYU)

FOTO: DENUS/PARLE/IW.

BULETIN PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH: Dr.

Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) ; Tatang Sutarsa, SH (Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag

Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: M. Ibnu Khalid; Iwan Armanias; Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos; Ketut Sumerta, S. IP

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos; Supriyanto; Agung Sulistiono, SH; Rahayu Setiowati; Muhammad Husen; Sofyan Effendi

REDAKTUR FOTO: Eka Hindra

FOTOGRAFER: Rizka Arinindya; Naefuroji; M. Andri

Nurdriansyah; Yaserto Denus Saptoadji; Andi Muhamad; Jaka Nugraha

SIRKULASI: Abdul Kodir, SH

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.III Gedung Nusantara

II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp.

(021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr-

pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita

Tindak Tegas Penyebar Kegiatan Disinformasi tentang PKI

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima Delegasi ormas-ormas Islam yang menyampaikan aspirasi terkait perlunya kewaspadaan terhadap kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kebetulan tanggal 30 September ini adalah 50 tahun terjadinya G30S /PKI. Delegasi ormas-ormas tersebut diantaranya FPI, FUI dan Gerakan Bela Negara serta Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia. Mereka menyampaikan bahwa usaha-usaha untuk membelokkan dan menghapus sejarah itu masih terus terjadi. Selama era reformasi ini, indikasi kebangkitan neo PKI itu benar adanya.

Menanggapi hal itu Fadli Zon menegaskan, PKI jelas merupakan partai terlarang di Indonesia. Dasar hukum pelarangan itu adalah Tap MPR No.25/1966 dan UU No.27/99 yang isinya jelas bahwa PKI adalah partai atau organisasi terlarang dan kegiatan yang terkait penyebaran ideology itu kecuali untuk kegiatan ilmiah, sehingga penegakan hukum atas UU ini menjadi penting.

Berdasarkan laporan atau masukan masyarakat ini, kata Fadli, pihaknya akan menegaskan kepada aparat berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan UU. Tidak bisa ada kegiatan pengibaran bendera PKI atau kegiatan-kegiatan penyebaran disinformasi dibiarkan, harus ada tindakan tegas.

“Saya termasuk yang berpendapat bahwa film G30S/PKI itu sudah benar dan secara riset sejarah juga sudah benar dan itu bukan hanya merupakan versi pemerintah ketika itu. Tapi memang menjadi kenyataan,” tegasnya.

Apalagi kalau dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa gerakan komunis di berbagai negara memang sangat kejam. Kekejaman PKI di Indonesia sudah terlihat sejak 1948



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berjabat tangan dengan Pimpinan FPI

dengan usaha kudeta dan tahun 1965 melakukan kudeta lagi. “Setidaknya ada dua kali kudeta yang dapat digagalkan. Ini fakta yang harus diingat dan diwaspadai,” ungkap Pimpinan Dewan Koordinator Polkam ini.

Terkait permintaan maaf Presiden kepada PKI, kata Fadli harus ditolak. Tidak bisa Presiden meminta maaf kepada PKI atau keluarganya, karena akan memicu konflik baru. Kalau meminta maaf berarti ada kesalahan, padahal peristiwa ketika itu PKI berusaha kudeta kemudian ditumpas. “Kalau ada usaha minta maaf harus ditolak,” jelas dia dengan menambahkan, janganlah pemerintah mencari-cari masalah karena masalahnya sudah banyak. (MP) FOTO:ANDI/PARLE/IW



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Agus Hermanto didampingi Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Efendi dan Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana menerima audiensi Gerakan Bersama (Geber)BUMN, Selasa (29/09).

Kedatangan Gerakan Bersama Pe-

DPR Agendakan Rapat Gabungan Selesaikan *Outsourcing* BUMN

kerja Badan Usaha Milik Negara (Geber BUMN) untuk meminta diadakannya rapat kerja gabungan antara pemerintah dengan lintas komisi di DPR khususnya Komisi VI dan Komisi IX untuk membahas hasil rekomendasi Panja Outsourcing BUMN.

“Audiensi hari ini berjalan lancar dan aspirasi dari Geber BUMN adalah menginginkan hasil Panja Komisi IX yang lalu ditindak lanjuti dan memang belum ada rapat gabungan dari Komisi IX dan VI yang melibatkan BUMN-BUMN yang terkait,” jelas Agus Hermanto

Lebih lanjut Agus Hermanto mengatakan, telah dilakukan kesepakatan dalam pertemuan tersebut bahwa akan dilakukan rapat gabungan dengan Komissis IX dan VI beserta BUMN, melibatkan Menteri BUMN, Menteri Tenaga

Kerja. “Mudah-mudahan apa yang diaudiensikan bisa betul-betul terwujud,” harapnya.

BUMN sebagai perusahaan yang difungsikan bagi perwujudan kesejahteraan bangsa, perlu dikawal pengelolaannya agar kemanfaatan umumnya bisa terwujud, khususnya bagi para pekerja di perusahaan negara tersebut.

Upaya mewujudkan rapat gabungan seringkali terbentur keengganan Kementerian BUMN maupun perusahaan BUMN untuk hadir dalam rapat penyelesaian masalah praktik alih daya di Komisi IX. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai *leading sector* seolah tidak mampu menegakkan aturan hukum ketenagakerjaan pada perusahaan-perusahaan BUMN yang melanggar. (SKR)

FOTO:JAKA/PARLE/HR

KETUA DPR BACAKAN IKRAR PADA UPACARA KESAKTIAN PANCASILA



Ketua DPR RI Setya Novanto membacakan ikrar pada Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Ketua DPR RI Setya Novanto membacakan ikrar pada Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2015 di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/1/2015). Pada upacara tersebut, hadir Presiden RI Joko Widodo sebagai inspektur upacara, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan sebagai pembaca Teks Pancasila dan Ketua DPD RI Irman Gusman sebagai pembaca Pembukaan UUD 1945.

Dalam kesempatan ini, Novanto menepis perihal isu Presiden akan meminta maaf kepada keluarga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). “Tidak ada permintaan maaf dari Presiden, Saya rasa peristiwa sejarah yang sudah berlalu akan selalu dikenang, semuanya telah selesai,” ujarnya

Ia menambahkan, lebih baik berpikiran maju sebagai NKRI, “Seharusnya kita tidak membuka luka lama bangsa ini. Peristiwa lampau sudah menjadi bagian dari sejarah politik negara kita. Saya berharap, jangan pernah ada pemikiran untuk melupakan sejarah. Namun kita juga harus melihat ke depan untuk tujuan yang lebih baik,” ujar Novanto.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Widodo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan meminta maaf kepada keluarga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) atas peristiwa pembantaian massal pada 30 September 1965.

“Tidak ada pemikiran mengenai minta maaf, sampai detik ini tidak ada ke arah itu,” kata Jokowi sekuat memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Kesaktian Pancasila.

Dalam acara tersebut, hadir pula Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Agus Hermanto serta para Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Negara lainnya. (JK) FOTO: DENUS/PARLE/HR

Keputusan Calon Tunggal Masih Perlu Kajian Teknis



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, kalau sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka harus dihargai meskipun secara teknis ini perlu dikaji. “Saya termasuk yang berpendapat seperti itu bahwa kalau ada calon perseorangan harusnya bisa dipilih secara ya atau tidak. Bukan dengan kertas kosong,” ungkapnya Rabu (30/9) di Gedung DPR, menanggapi dikabulkannya gugatan calon tunggal dalam pilkada. MK memutuskan calon tunggal boleh ikut pilkada dengan pemilih menyatakan setuju (ya) atau tidak.

Tapi menurut Fadli, ya atau tidak ini secara teknis akan problematik, karena jumlah pemilih dan berapa yang memilih. Kalau ternyata yang memilih ini kurang dari 50% apakah

artinya dia abstain. “Jadi kalau memilih ternyata penduduknya 50 ribu yang memilih hanya 200 orang, yang tidak memilih itu siapa. Masih perlu ada kajian teknis bagaimana prosedurnya,” tukasnya.

Dikatakannya, yang diputuskan beberapa waktu lalu, kalau hanya satu calon maka akan dibawa pada pilkada berikutnya. Tapi kata Fadli, dirinya setuju sebaiknya dalam pemilihan calon tunggal itu ya atau tidak.

Seharusnya, sambung Pimpinan DPR bidang Polkam ini, sejak awal dirancang masalah calon tunggal. MK sendiri tidak memberi masukan terkait dengan calon tunggal. DPR saat itu meminta revisi UU Pilkada, tapi pemerintah tidak mau sehingga UU tersebut tidak sempurna. DPR juga meminta masukan dari MA dan MK dan belum tercakup masalah calon tunggal.

Saat ditanyakan dengan keputusan MK maka akan menjadi preseden buruk pada pilkada 2017 karena dikhawatirkan calon akan memborong partai ke arah calon tunggal. Menurut Fadli, hal itu bisa terjadi. Karena itu, yang perlu dicari solusi adalah bagaimana teknis, supaya dibentengi dan tidak terjadi preseden buruk tersebut. Bisa terjadi kecenderungan mereka yang merupakan calon kuat kemudian mengambil semua dukungan dari parpol-parpol yang ada sehingga maju sendiri. “Itulah yang perlu dibuat aturan teknisnya,” ujarnya lagi. (MP) FOTO: ANDI/PARLE/HR

PENGIBARAN BENDERA PALESTINA DI PBB, PENGAKUAN KEDAULATAN NEGARA DAN RAKYAT PALESTINA

Bendera Negara Palestina, akhirnya dikibarkan di Markas Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) di New York Amerika Serikat. Pengibaran Bendera ini, adalah pertama kalinya dan merupakan sejarah besar di dunia. Dimana selama ini, Palestina selalu mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Israel. Tidak hanya negara - negara Islam saja yang mendukung, Palestina menjadi bagian dari PBB, Indonesia juga sangat mendukung.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, bahwa pengibaran Bendera Palestina di Markas PBB ini, baru sebagai simbol, tetapi harus ada yang lebih bersifat substantif yaitu harus ada pengakuan yang penuh terhadap kedaulatan negara dan rakyat Palestina.

“Pemasangan Bendera Palestina di markas PBB itu, hanyalah sebuah simbol saja, tetapi harus ada substansi yang lebih besar, yaitu pengakuan terhadap kedaulatan negara Palestina, mengenai bentuk pemerintahan secara merdeka dan keluar dari intervensi Israel,” ujar Fahri kepada wartawan di Gedung DPR Kamis (01/10/2015).

Fahri menuturkan, untuk membantu Palestina agar menjadi negara yang merdeka, berdaulat adalah membantu proses transisi kemudian membantu proses pemilu dan membantu pembangunan pemerintahan Palestina yang utuh dan membantu Palestina agar tidak ditindas oleh Israel.

Mengenai sikap Indonesia sendiri, Fahri menegaskan, Indonesia tetap mendukung setiap bangsa untuk merdeka dan lepas dari penjajahan negara Israel.

“Seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden Soek-



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

arno, bahwa kemerdekaan Palestina merupakan perjuangan abadi bangsa Indonesia, jadi kita akan selalu mendukung perjuangan dan kemerdekaan Palestina,” tegas Fahri. (AS)

FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR

Pemerintah Harus Tetapkan Bencana Nasional Kabut Asap

Masalah kabut asap yang melanda sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan akibat dari kebakaran hutan, semakin memprihatinkan. Dimana warga di daerah-daerah yang terkena kabut asap tersebut, sudah banyak yang mengidap penyakit ISPA. Kabut asap yang menyelimuti Sumatera dan Kalimantan telah berdampak sampai ke negara tetangga Malaysia dan Singapura.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, bahwa pemerintah harus bersikap tegas dan sigap dalam menangani masalah kabut asap ini.

“Saya mendesak pemerintah agar masalah kabut asap ini harus ditetapkan sebagai bencana nasional, dan ditangani secara nasional juga,” ujar Agus Hermanto di Gedung DPR Kamis (1/10).



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Agus menilai, bahwa penanganan kabut asap yang dilakukan oleh peme-

rintah sejauh ini belum maksimal, untuk itu pemerintah harus mengambil sikap tegas agar masalah kabut asap ini cepat selesai.

“Bukannya menolak bantuan negara tetangga untuk menanggulangi masalah asap ini, namun pemerintah masih bisa mengatasi kebakaran hutan ini,” tegasnya.

Kabut asap yang melanda sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan, menyebabkan aktivitas masyarakat di daerah - daerah itu lumpuh total, dimana banyak sekolah dan perkantoran di kota Pekanbaru yang terpaksa diliburkan, akibat kabut asap yang cukup pekat. Selain itu, beberapa hutan di Kalimantan juga ikut terbakar, sehingga menimbulkan berbagai penyakit. (AS)

FOTO: JAKA/PARLE/HR



Ketua DPR RI Setya Novanto saat diwawancara wartawan

Hari ini 1 Oktober tepat satu tahun DPR periode 2014-2019 bekerja, dan introspeksi pun muncul dari Ketua DPR Setya Novanto.

DPR SATU TAHUN, BANYAK PR YANG HARUS DISELESAIKAN

“Hari ini tepat 1 tahun DPR, dan saya selaku Ketua DPR mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang telah melakukan kerja keras, dari segi pengawasan dan juga anggaran sudah dilakukan secara baik, dan komunikasi dengan pemerintah juga semakin ditingkatkan,” ujar Setya Novanto, di Gedung DPR Kamis (01/10/2015).

Ketua DPR juga sangat berharap, agar Rancangan Undang-undang bisa terselesaikan dalam tahun ini. “Saya meminta doa restu kepada seluruh rakyat Indonesia, agar DPR bisa menjadi lebih baik lagi, tentu dengan

dukungan dari masyarakat Indonesia juga,” jelas Novanto.

1 Oktober 2015, setahun sudah DPR periode 2014-2019 menjadi wakil rakyat, namun kinerja anggota Dewan dinilai belum memuaskan masyarakat Indonesia. Hal ini bisa terlihat, banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang belum terselesaikan, dan juga masih banyak pekerjaan yang belum terlihat hasilnya, salah satunya pembahasan calon Pimpinan KPK, yang seharusnya sudah dilaksanakan oleh Komisi III DPR, dan masih banyak lagi kinerja DPR yang menjadi sorotan masyarakat. (AS) FOTO: ANDRI/PARLE/HR

Taufik Kurniawan: Hadapi MEA 2015 dengan Optimisme

Segep komponen bangsa perlu mengembangkan sikap optimisme dalam menghadapi tantangan pasar bebas Asean yang mulai berlaku pada penghujung tahun 2015. Dengan atau tanpa program MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), Indonesia tetap harus melakukan pergerakan untuk menghadapi tantangan globalisasi.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, saat membawakan materi pada acara *hearing* dalam rangka Temu Administrator Muda Indonesia 2015, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu (30/09/15). *Hearing* mengambil tema “Upaya Pemanfaatan ASEAN Community 2015 untuk Mendukung Kemajuan Daerah”. Acara ini diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari 24 universitas dari seluruh Indonesia.

“Kita harus optimis bahwa kita siap menghadapi MEA. Apalagi, kita memiliki berbagai potensi. Dengan waktu yang kurang dari 3 bulan ini, masih ada waktu agar tantangan ini menjadi kesempatan. Kita lakukan persiapan dengan hal-hal yang konkrit. Tapi, tanpa adanya MEA pun, kita harus melakukan *self motivation* dan *movement*,” tegas Taufik, usai acara.



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Taufik memaparkan, Indonesia memiliki beberapa potensi, diantaranya, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia merupakan satu-satunya negara Anggota G-20 di ASEAN. Kemudian, sebanyak 56.6 persen populasi Indonesia merupakan middle class, dan berada di ranking ke-38 dari 148 negara dalam *Global Competitiveness Index*.

“Jangan lupa, kita satu-satunya ne-

gara ASEAN yang masuk G-20, market kita luar biasa dan salesnya juga besar. Kemampuan industri kreatif kita harus terus dikembangkan. Apalagi, jika dilihat dari *demographic dividend*, sebanyak 60 persen penduduk Indonesia berusia muda, atau di bawah 39 tahun. *Demographic dividend* ini akan dinikmati pada tahun 2020 - 2030,” jelas Taufik.

Dengan adanya tiga *cluster* di ASEAN Community, yakni *cluster* ekonomi, *cluster* politik keamanan, dan *cluster* sosial budaya, lanjut Taufik, persiapan pun harus dilakukan di berbagai bidang. Salah satunya persiapan di bidang Sumber Daya Manusia. Diharapkan, pendidikan kepada SDM Indonesia bukan hanya meliputi teori saja, tetapi juga pengasahan keterampilan.

“Kita harus menyiapkan pendidikan, yang tidak hanya teori saja, tetapi juga juga *skill labour*. *Skill labour* harus bersaing, yang meliputi diantaranya kemampuan bahasa dan kemampuan *skill* yang harus diperkuat. Salah satu tantangan besar dunia pendidikan nasional kita adalah menanamkan kesadaran kolektif sebagai bangsa yang perlu berjuang keras untuk mencapai kemajuan, mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain dalam banyak

aspek,” imbuh politikus F-PAN itu.

Taufik menilai, kemampuan bersaing SDM tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan baik secara formal maupun informal. Untuk itu, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik di dalam negeri maupun intra-ASEAN, untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil dari luar.

“Dengan demikian, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, khususnya di kawasan ASEAN. Meningkatkan kualitas SDM harus diarahkan pada penguasaan iptek untuk menopang kegiatan ekonomi agar lebih kompetitif,” ujar Taufik.

DPR, sebagai mitra kerja Pemerintah, tambah Taufik, sudah melakukan berbagai upaya dalam persiapan menghadapi MEA. DPR sepakat untuk

mendukung Pemerintah, khususnya dalam meningkatkan daya saing dan menyiapkan strategi politik terkait dengan pendidikan dalam menciptakan *skill labour* yang lebih berkualitas,” jelas politikus asal dapil Jawa Tengah itu.

“Kita harapkan ini bukan hanya suatu format abstrak saja, tetapi betul-betul kita dukung program dan terobosan dari Pemerintah. DPR akan mendukung terkait dengan penganggaran. (SF)

FOTO: SOFYAN/PARLE/HR

DIVESTASI SAHAM FREEPORT HARUS DIAMBIL PEMERINTAH

Pemerintah Indonesia harus siap mengambil divestasi saham Freeport sebesar 10,64 persen yang akan dilepas pada Oktober ini. Nilai sahamnya mencapai USD 2 miliar atau sekitar Rp29 triliun bila dihitung dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp14.500.

Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir kepada Parlementaria, Kamis (1/10), menegaskan, “Saya setuju pemerintah membeli saham Freeport. Itu memang konsep yang sudah lama diajukan bahwa Freeport harus melakukan divestasi saham sampai Pemerintah Indonesia mendapat mayoritas,” kata Hafisz.

Rencananya pada 2019 divestasi akan ditingkatkan lagi menjadi 30 persen. Selama ini saham pemerintah di Freeport baru 9,36 persen. Bila ditambah 10,64 persen lagi, penguasaan sahamnya hampir 20 persen. Menurut politisi PAN ini, karena kegiatan usaha Freeport ada di hilir (downstream) dan menghajati hidup orang banyak, maka negara wajib ada dalam kegiatan usaha



Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir

tersebut.

Persoalannya pemerintah sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang kesiapan membeli saham Freeport itu. Tawaran pertama memang diajukan kepada pemerintah. Bila pemerintah tak bisa membeli, penawaran selanjutnya diajukan ke Pemda setempat, lalu BUMN, dan terakhir kepada swasta nasional. Menteri Keuangan Bambang

Brojonegoro beberapa waktu lalu pernah mengatakan, pemerintah tak memiliki anggaran cukup di APBN 2015 untuk membeli saham.

Ditegaskan Hafisz, “Membeli saham tidak harus dengan uang cash atau PMN. Bisa dengan barter aset negara yang tidak produktif. Atau bisa juga dengan kerja sama lain. Yang penting saham pemerintah masuk. Pemerintah harus bisa membeli. Karena kalau ditambah 10 persen lagi, berarti sahamnya hampir 20 persen. Ini berarti jadi mayoritas kedua setelah McMoran.”

McMoran adalah perusahaan tambang terkemuka dunia dari Amerika Serikat. Bila pemerintah kelak tak mampu membeli, maka yang paling mungkin dibeli oleh BUMN. Dikatakan Hafisz, kemungkinan tidak satu BUMN saja yang bisa membeli. PT. Antam, Krakatau Steel, Inalum, dan Bukit Asam merupakan tiga dari BUMN yang mungkin disarankan membeli secara bersamaan saham Freeport tersebut.

(MH) FOTO: ANDRI/PARLE/HR

SISTEM OUTSOURCING TIDAK MANUSIAWI

Harapan Pimpinan DPR untuk melakukan Raker Gabungan antara Komisi VI dengan Komisi IX dimaksudkan untuk menemukan titik temu masalah karyawan *outsourcing* BUMN,” jelas Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Effendi, Selasa (29/9) di Jakarta.

Lebih lanjut Dede Yusuf berharap rekomendasi Panja *Outsourcing* DPR yang telah dilakukan tahun 2014, bisa diteruskan kembali oleh menteri-menteri terkait, guna mencari



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Ketua Komisi IX Dede Yusuf

titik temu antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang BUMN.

Pada dasarnya kata Dede, UU Ketenagakerjaan berlaku untuk semua perusahaan dari swasta maupun negara, ketika berbicara ketenagakerjaan, tentunya yang berlaku adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini disalahartikan oleh BUMN dimana memiliki aturan-aturan sendiri, sehingga *outsourcing* di lempar ke subkontraktor.

Terkait dengan *outsourcing* sendiri, kata Dede, adalah se-

buah sistem yang tidak manusiawi, karena *outsourcing* itu mempekerjakan orang tanpa status yang jelas.

“Konteksnya adalah ada pekerjaan-pekerjaan yang menjadi inti dari pada sebuah perusahaan ini harus menjadi karyawan tetap dan saya pikir harus kita rumuskan bersama. Mana pekerjaan inti dan mana pekerjaan yang tidak inti, sehingga untuk BUMN yang jumlah ratusan ini harus jelas mana menspesifikkan mana pekerjaan yang inti,” katanya.

(SKR) FOTO: JAKA/PARLE/HR

Dalam Tangani Sengketa Tanah Jangan Hadapi Rakyat Seperti Teroris

Anggota Komisi II DPR Henry Yosodiningrat meminta aparat kepolisian dalam menangani sengketa tanah antara rakyat dengan siapapun agar tidak menghadapinya seperti teroris. Rakyat juga jangan dihadapi seperti melawan tentara asing yang melakukan agresi.

“Mereka adalah anak bangsa dan rakyat kita yang harus dilindungi, bukan diperlakukan seperti musuh ditembak dengan peluru karet, dihalaui dan dipentung,” kata Henry saat pertemuan dengan Kanwil BPN Lampung dan jajarannya, Sekda Prov. Lampung serta kepolisian Lampung di Bandarlampung, Senin (28/9) lalu.

Bersama Tim Kunker Spesifik Panja Pertanahan Komisi II dipimpin Wakil Ketua Komisi Ahmad Riza Patria, yang terdiri 11 anggota secara khusus mengunjungi Lampung gelar perkara atas kasus-kasus tanah yang terjadi. Baik kasus pertanahan antara masyarakat dengan BUMN, dengan BUMD, dengan swasta maupun kasus pertanahan antara masyarakat dengan Pemprov.

Menurut Henry, dalam penanganan kasus-kasus tanah sering mengakibatkan benturan dan menimbulkan korban jiwa. Untuk itu dia menegaskan kembali agar polri dalam menangani sengketa tanah antara rakyat dengan siapapun bersikap profesional tanpa mengakibatkan korban jiwa.



Anggota Komisi II DPR Henry Yosodiningrat

Sebelumnya mantan pengacara ini menggaris bawahi pernyataan dua anggota DPR Tagore Abu Bakar dan Budiman Sudjatmiko ada perusahaan melampaui HGU yang diberikan. Menyimak penjelasan Kanwil BPN, penyelesaian kasus tanah seakan-akan hak rakyat boleh dilanggar, dirampas lalu diberi ganti rugi. Setelah diberi ganti rugi lalu kalau ada permasalahan ke pengadilan.

“Pengalaman selama puluhan tahun menjadi praktisi hukum dalam membela rakyat miskin selalu kalah. Bila berhadapan dengan badan-badan hu-

kum yang memiliki HGU pasti akan *di-backup* BPN, BPN pasti nggak mau kalah dan sertifikat dibatalkan. Perusahaan besar *di-backup* penguasa kebetulan ketemu hakim yang hanya berpihak uang, maka rakyat kecil jadi korban,” tegas Henry.

Sikap serupa dinyatakan anggota Tim Komisi II Tagore Abu Bakar bahwa jawaban Kanwil BPN Lampung cenderung bela pengusaha. “Nggak ada kata-kata rakyat harus diapakan, yang ada pengusaha sudah punya hak. Kami datang untuk bela rakyat, sama-sama turun investigasi, supaya selesai, mau lihat surat ukurnya, system ukurnya lalu patok batas yang disaksikan kepala desa,” ungkap dia.

Seharusnya, tambah Tagore, tanah hak adat itu diperdakan. Tapi Bupati-bupati lupa bahwa itu ada kewajiban yang harus dilaksanakan bersama DPRD, sebab kalau sudah diperdakan aman betul. “Jawaban BPN tidak lengkap, karena itu kami akan investigasi dengan Dirjen Sengketa sampai dimana kebenaran HGU ini dan harus demi kepentingan rakyat. Tatkala rakyat membutuhkan, maka HGU harus mengalah bukan dibayar. HGU banyak dikuasai orang asing, sementara rakyat sendiri tidak punya tanah,” keluh politisi PDI Perjuangan asal Aceh ini. (MPI) FOTO: MASTUR/PARLE/IW

Setjen DPR Komit Lanjutkan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka evaluasi dan validasi pelaksanaan reformasi birokrasi di berbagai Kementerian dan Lembaga, termasuk DPR RI, Setjen DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (KemenPAN-RB)

menggelar evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Ini adalah bentuk komitmen dari Setjen DPR untuk melakukan reformasi birokrasi. Dari evaluasi ini ada dua hal,

pertama menurut ketentuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dinilai secara mandiri yang kita kenal dengan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Itu sudah dilakukan, dan disambut dalam bentuk dukungan kepada KemenPAN RB pada Maret 2012 lalu, dan penilaian satu tahun di 2014. Dari dokumen penilaian mandiri akan divalidasi oleh Menpan RB," jelas Inspektur Utama Setjen DPR RI, Setyanta Nugraha.

Dilanjutkan Toto, begitu ia biasa disapa, dari dokumen penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen mendapat Predikat B dengan nilai 71,94 persen. Nilai ini kemudian akan divalidasi apakah sesuai dengan dokumen-dokumen sebagai bukti.

Sekjen DPR RI menurut Toto, sudah melakukan kegiatan reformasi birokrasi, yang jelas nampak adalah di penataan kelembagaan yang sudah menghasilkan restrukturisasi organisasi. Organisasi Setjen yang awalnya mendukung dewan dengan empat deputi dibawahnya, maka untuk mengoptimalkan kinerjanya, berubah struktur dengan hanya dua Deputi, Inspektur utama dan badan keahlian dewan.

"Ini merupakan satu langkah maju untuk mengoptimalkan kinerja organisasi Setjen DPR. Badan keahlian dewan dalam rangka memperkuat dewan dibidang keahlian. Akuntabilitas. Sementara pengawasan di Setjen DPR sekarang ditingkatkan menjadi Eselon I dengan jabatan Inspektur utama. Komitmen untuk peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja Sekjen," paparnya.



Suasana rapat Setjen DPR RI dengan KemenPAN-RB

Sementara itu menurut Teguh, Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi mengatakan banyak perubahan yang telah dilakukan DPR RI yakni dengan melakukan upaya restrukturisasi dan mengubah struktur menjadi lebih efisien. Ini sebuah langkah bagus untuk reformasi birokrasi. Oleh karena itu ia meyakini tahun ini akan ada kenaikan yang signifikan dari kinerja dan akuntabilitas Setjen dari tahun sebelumnya. (AYU FOTO:DENUS/PARLE/IW.

KOMISI II INGINKAN PILKADA BERLANGSUNG AMAN DAN DEMOKRATIS



Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman memimpin rapat di Kantor Gubernur Sumut

Dalam rangka evaluasi dan proses persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman, mengatakan Pilkada harus terlaksana secara aman dan demokratis.

"Bagi Komisi II Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember

2015 harus berjalan aman, tertib dan demokratis," kata Rambe, di Kantor Gubernur Sumut, (29/9/2015).

Menurutnya, ukuran demokratis yang dirumuskan ada 3, diantaranya tahapan-tahapan pilkada sebagaimana aturan yang sudah dirumuskan bisa diselenggarakan secara konsisten. Tahapan itu misalnya sampai pada tahapan terakhir dari DPS hingga DPT harus *clear*.

"Jangan sampai lebih banyak yang memilih daripada DPT. Ini pilkada serentak harus dicek betul," kata Rambe. Misalnya orang yang memilih di Kota Binjai adalah orang yang tinggal dan memiliki KTP di Binjai.

Selain itu, aturannya PNS ataupun SKPD tidak boleh ikut campur pelaksanaan kampanye Pilkada. "Kita menginginkan Pilkada lebih baik dari pada yang lalu-lalu" tegasnya.

Plt. Gubernur Provinsi Sumatera Utara menjelaskan dari 33 Kabupaten/kota, 23 diantaranya akan melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2015.

Dari 23 kabupaten/kota tersebut, terbagi atas dua kelompok, kelompok pertama 14 kabupaten/kota yang kepala daerahnya sudah habis masa jabatan sebelum masa Pilkada dimulai, sedangkan 9 lainnya akan habis masa

jabatan setelah Pilkada.

“Jumlah peserta pemilih adalah 6.807.340 orang. Ada 61 pasangan calon berasal dari partai politik, dan 14 pasangan calon dari perseorangan,” paparnya.

Selain itu, kemungkinan potensi

konflik yang akan terjadi pada Pilkada ini, yaitu pada tahap pemutahiran data, black campaign, money politik, dan yang paling penting pada tahap pemungutan suara. Selain itu, ketidaknetralan PNS dan masalah seperti pembiayaan oleh kabupaten/kota kepada

penyelenggara Pilkada karena masih menunggu proses APBD.

“Kita berharap Pilkada ini bisa sukses dan diharapkan partisipasi masyarakat bisa di atas 70 persen” tuturnya. (AS)

FOTO:AGUNG/PARLE/HR

SOSIALISASI UUPA KURANG, AKIBATKAN KEKERASAN ANAK MARAK

Anggota Panitia Kerja (Panja) Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti menilai kurangnya sosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak menjadi salah satu penyebab maraknya kekerasan terhadap anak.

“Kekerasan terhadap anak diibaratkan seperti gunung es, yang terlihat sedikit namun sebenarnya sangat banyak. Saya menilai ada beberapa faktor yang menjadi penyebab makin maraknya kekerasan terhadap anak. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Orangtua terutama masyarakat menengah ke bawah terkadang menganggap anak adalah haknya, termasuk cara mendidik sesuka orangtuanya. Padahal anak merupakan individu yang juga dilindungi undang-undang, tidak ada pengecualian semua harus tunduk

terhadap undang-undang itu, termasuk orangtua,” jelasnya.

Selain kurangnya sosialisasi undang-undang Perlindungan Anak, Endang juga menilai kehebatan teknologi informasi membuat kekerasan terhadap anak semakin meningkat, terutama kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik yang dilakukan oleh orang dewasa ke anak, maupun kekerasan seksual anak terhadap anak lainnya. Oleh karena itu, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menilai perlunya peran semua pihak untuk ikut menekan terjadinya kekerasan terhadap anak.

“Peran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat penting untuk proses sosialisasi ke seluruh elemen masyarakat baik menengah ke bawah maupun ke atas. Terlebih lagi saat ini, anggaran



Anggota Komisi VIII DPR Endang Maria Astuti

Kementerian ini yang meningkat, dan pada akhirnya dapat lebih leluasa menjalankan berbagai program perlindungan anak. Selain itu peran pemerintah daerah beserta stakeholder di dalamnya, termasuk aparat kepolisian yang harus ikut dalam pencegahan kejahatan terhadap anak,” tegasnya. (AYU)

FOTO:JAKA/PARLE/IW

Komisi II Bertekad Selesaikan RUU Pertanahan



Anggota Komisi II DPR saat pertemuan dengan Kepala Kanwil BPN Lampung dan Sekda di Bandar Lampung

Komisi II DPR bertekad akan bisa menyelesaikan RUU Pertanahan guna menjawab permasalahan pertanahan yang terjadi. RUU Pertanahan diharapkan menjadi karya besar DPR yang dapat mempermudah penyelesaian kasus-kasus tanah.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria dan anggota Komisi II Budiman Sudjatmiko, saat pertemuan dengan Sekda, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung beserta jajaran serta Dirjen Penanganan Masalah Agraria Bambang Tri Suryo Binantoro, Senin (28/9) di Bandar Lampung.

Menurut Ahmad Riza, kunjungan kerja spesifik ke Lampung kali ini dilatarbelakangi maraknya konflik dan sengketa pertanahan di daerah ini dan juga di daerah lain di Indonesia. Masalah konflik tanah merupakan persoalan besar bagi bangsa karena tidak ada kunjung penyelesaian. Masalahnya

bukan makin reda justru bereskalasi dari waktu ke waktu dan mengarah pada tindakan anarkis yang merugikan semua pihak.

Konflik dan sengketa tanah ini sudah lama dibiarkan dan semakin berlarut-larut dan kemudian menjadi kasus yang sangat kompleks dan tidak mudah untuk dipecahkan. Dengan akan dibahasnya RUU Pertanahan, dia berharap dapat mempermudah penyelesaian kasus-kasus tanah.

Hal yang sama ditegaskan anggota Komisi II Budiman Sujatmiko dengan adanya Menteri Agraria dan Tata Ruang pada pemerintahan sekarang ini diharapkan punya taring untuk kembali menempatkan soal tanah ke masalah agrarian. Acuanannya adalah UU Pokok Agraria dan RUU Pertanahan yang sedang disusun. "RUU Pertanahan harus cepat diselesaikan. Harus menjadi karya besar DPR untuk menjawab masalah pertanahan," jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkap data dari penelitian IPB dan mantan Kepala BPN Joyowinoto, 56% aset nasional hanya dikuasai oleh 0,2% penduduk atau 400 ribu orang saja dari 240 juta, orang di Indonesia. Aset itu seperti

tanah, tambang, hutan, gunung, sungai dikuasai hanya oleh 400 ribu orang. Dimana 87% dalam bentuk penguasaan atas tanah sehingga tingkat ketimpangan atas tanah adalah 0,6 artinya melampaui koefisien dini atau ketimpangan rata nasional 0,43. Sementara tanah 0,6-07 artinya melampaui ketimpangan rata-rata nasional dan banyak ukuran sudah melampaui titik ledak sosial yang luar biasa.

"Karena itu, jangan anggap ringan masalah tanah, dan dikatakan sudah diselesaikan. Soal tanah adalah soal sejarah, filosofi, ideologi dan soal ke Indonesiaan. Nggak bisa menyelesaikan masalah tanah secara administratif semata," tegas dia.

Untuk berbagai kasus tanah di Lampung ini diusulkan gelar perkara dengan melibatkan masyarakat, Pemda, BPN digelar perkara di DPR. Seperti kasus Mesuji yang lalu di DPR. Supaya persoalannya jernih tanpa ada kekisruhan apapun, silahkan Gubernur dan dari pihak perusahaan gulanya (sugar corporation) juga ikut serta ada wakil petani. "Kalau bisa sebelum akhir tahun, untuk mencegah jangan sampai berlarut-larut," tutup Budiman. (IMP) FOTO:MASTUR/PARLE/IW

Revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 Untuk Lindungi TKI



Ketua Komisi IX Dede M Yusuf pada acara Dialektika Demokrasi

Tujuan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri semata untuk memproteksi dan melindungi TKI. Karena, sebelumnya perlindungan TKI semua dibebankan kepada swasta. Tapi, kini dibebankan pada pemerintah.

"Dalam revisi ini pemerintah pada akhir Desember 2015 diharapkan sudah selesai menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Surpresnya (Surat Presiden) segera keluar, dan DPR RI segera menyelesaikan dan mengesahkan pada awal tahun 2016," kata Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf dalam diskusi forum legislasi 'Revisi UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri' bersama Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, dan Ketua

Migrant Care Anis Hidayah di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (29/9/2015).

"Dengan hadirnya negara untuk perlindungan TKI di luar negeri tersebut, maka ke depan komunikasinya antara pemerintah dengan pemerintah (G to G), termasuk negara mana yang dibuka dan atau ditutup untuk pengiriman TKI. Sehingga kalau tidak punya UU Ketenagakerjaan atau peraturan (kontrak kerja) yang sederajat dan mengikat, maka kita tidak mengirimkan TKI," tegas politisi Demokrat itu.

Diakui Dede, jika dalam revisi ini sifatnya banyak instruksi agar pemerintah lebih aktif dalam memberikan perlindungan TKI di luar negeri dan langsung berkomunikasi dengan negara terkait, sehingga pelayanannya pun menjadi satu atap, satu pintu. Baik sejak

rekrutmen, pelatihan, pengiriman, dan perlindungan.

"Tentu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat. Dimana rekrutmen, pelatihan dan pengiriman itu dilakukan melalui daerah karena didata dari desa. Anggarannya pun bisa dialokasikan melalui APBD maupun APBN," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menegaskan dari struktur dan konten, materi dalam revisi UU No.39 tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri ini belum banyak perubahan dibanding UU yang asli sebelumnya. Hanya nama dan istilahnya yang berubah, tapi aspek filosofi dan strukturnya sama, sehingga belum bisa menjawab ekspektasi perlindungan TKI di luar negeri.

"Juga belum sesuai dengan UU No.12 tahun 2011 tentang tata cara urutan perundang-undangan," tegas Nusron Wahid.

Khusus mengenai pekerja migrant kata Ketua Umum PP GP Ansor ini, setidaknya harus sesuai dengan amanat konstitusi (pasal 27 UUD NRI 1945), setiap WNI berhak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, soal penempatan TKI di luar negeri diatur oleh UU tersendiri (UU No.13 tahun 2003), sesuai ratifikasi konvensi PBB (UU No.6 tahun 2012), maka UU TKI itu tidak boleh menyimpang dari ketiga UU tersebut. "Selebihnya tergantung fenomena sosial dan politik," tutur Nusron. (SC/NT)

FOTO: ANDRI/PARLE/HR

BALEG DPR TINJAU SISTEM KEAMANAN KOMPLEK GEDUNG PARLEMEN



Pimpinan dan Anggota Baleg didampingi wakil dari Mabes tinjau sistem keamanan kompleks gedung DPR.

Sebagai tindak lanjut rapat antara Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dengan Mabes Polri mengenai Sistem Pengamanan di Gedung DPR RI, Rabu (30/9/2015), Baleg melakukan peninjauan sistem keamanan di kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam peninjauan tersebut, Pimpinan dan Anggota Baleg didampingi wakil dari Mabes Polri Y. Agus Mulyono, Kepala Biro Umum Setjen DPR RI Mardian Umar, perwakilan dari Setjen MPR RI dan DPD RI.

Menurut Ketua Baleg Sareh Wiyono, tujuan peninjauan keliling kompleks Gedung DPR RI ini adalah dalam rangka penyatuan pengamanan antara Gedung DPR RI, MPR RI dan DPD RI.

“Selama ini kami melihat sistem keamanan di kompleks gedung DPR RI masih kurang baik. Oleh karena itulah, kami bekerja sama dengan pihak kepolisian agar bagaimana sistem keamanan di Gedung Parlemen ini benar-benar terkoordinir dengan baik,” kata Sareh di sela-sela peninjauan.

Sareh melanjutkan, saat ini Baleg sedang membahas *draft* Peraturan DPR RI tentang Sistem Pengamanan Terpadu di Gedung Parlemen. Setelah peninjauan ini, Baleg akan me-

minta masukan dari Kepala Biro Umum Setjen DPR RI mengenai sistem pengamanan ini.

Sareh menegaskan, bahwa DPR bukan membentuk polisi parlemen tapi sistem pengamanan terpadu di kompleks Gedung Parlemen. Ia mengaku banyak yang salah mengartikan mengenai hal ini, seolah-olah DPR akan membentuk polisi parlemen sendiri.

“Sebetulnya bukan demikian, tapi bagaimana sistem pengamanan di Gedung Parlemen ini tertata dengan baik. Dengan demikian kita harus bekerja sama dengan pihak kepolisian. Tidak mungkin kita akan berdiri sendiri,” papar Sareh.

Sementara, Y. Agus Mulyono dalam kesempatan yang sama menyatakan, Kepolisian sangat *concern* pada peningkatan keamanan. Karena menurutnya Gedung Parlemen merupakan salah satu obyek vital yang harus diamankan, sehingga Kepolisian sangat mendukung upaya-upaya dari DPR sendiri termasuk lembaga lain yang ada di sini, sehingga bisa diciptakan suatu sistem pengamanan yang terpadu.

“Sistem pengamanan terpadu ini tentunya berdasarkan standar-standar pengamanan obyek vital nasional yang sudah kita terapkan diseluruh obyek vital nasional dan intinya adalah kita memberdayakan unsur pengamanan internal,” terang Agus.

Di Gedung Parlemen sendiri, tambahnya, sudah ada unsur pengamanan internal. Sehingga, melalui unsur-unsur Kepolisian yang ada, akan diberdayakan. Ia menginformasikan bahwa sudah ada pembicaraan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas unsur pengamanan internal yang ada di kompleks parlemen ini.

“Pihak swasta pun bisa kita gandeng yang penting semua harus ikut sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama mengenai pengamanan obyek vital karena Gedung Parlemen merupakan salah satu obyek vital nasional sehingga pengamanannya pun tidak boleh lepas dari ketentuan yang mengatur tentang pengamanan obyek vital,” tegasnya. (SC)

FOTO: ANDRI/PARLE/HR

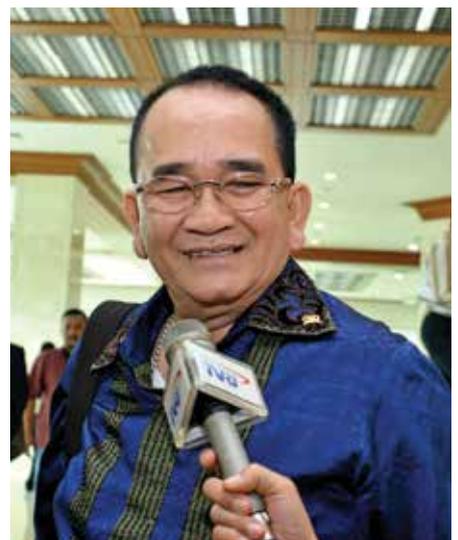
KOMISI III TELUSURI KASUS TEWASNYA SALIM KANCIL DI LUMAJANG

Komisi III DPR pada Jumat (2/10) melakukan kunjungan spesifik ke desa Selok Awar-Awar, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kunjungan tersebut, terkait dengan kasus penganiayaan aktivis penolak Tambang Salim Kancil oleh orang-orang yang mendukung tambang yang terjadi beberapa hari lalu.

“Saya dan beberapa anggota komisi III pada Jumat akan melakukan kunjungan spesifik ke Desa Selok Awar-Awar,

kabupaten Lumajang Jawa Timur, untuk melakukan investigasi terkait kasus menyebabkan meninggalnya Salim Kancil,” ujar Ruhut Sitompul kepada wartawan di Gedung DPR Kamis (01/10/2015).

Ruhut yang juga politisi partai Demokrat ini sangat menyesalkan kejadian tersebut. “Dalam kunjungan itu, Komisi III meninjau langsung lokasi penambangan dan juga bertemu pihak-pihak terkait dan juga keluarga korban,”



Anggota Komisi III Ruhut Sitompul

ungkap Ruhut.

Ruhut berharap, siapapun yang terlibat dalam kasus ini, harus segera ditindak dan diusut tuntas, karena sudah tidak jamannya lagi menggunakan cara-cara kekerasan seperti penganiayaan terhadap seseorang.

“Saya berharap agar pihak kepolisian, dapat segera mengusut dan mengungkap siapa aktor dalam peristiwa tersebut,” tegas Ruhut.

Seperti diberitakan, Salim Kancil, aktivis Forum Anti Tambang tewas dianiaya. Dia diculik lalu dibunuh dengan

cara disiksa oleh puluhan preman yang mendukung tambang pasir di Desa Selok Awar-awar, Lumajang, Jatim.

Selain Salim, aktivis lainnya Tosan mengalami luka berat dan kritis dirawat di ruang ICU di RSUD Lumajang. (AS)

FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR

Usulan Dividen BUMN Rp34 Triliun Dipertanyakan

Usulan Menteri BUMN untuk menambah setoran dividen dari sejumlah BUMN yang mencapai Rp34 triliun dalam RAPBN 2016 masih dipertanyakan para anggota Komisi VI DPR RI. Diharapkan tidak ada tekanan dari pemerintah kepada BUMN untuk memenuhi target dividen itu.

Anggota Komisi VI DPR RI Sungkono (dapil Jatim I) usai mendengar paparan pengajuan penyertaan modal negara (PMN) untuk sejumlah BUMN, Kamis (1/10), mempertanyakan usulan tambahan dividen dari yang semula Rp31,164 triliun menjadi Rp34,164 triliun.

“Dalam memberikan setoran dividen kepada negara, mestinya dilakukan setelah ada RUPS. Mengapa perubahan muncul seperti ini. Apa asumsi dasarnya?” ujarinya penuh tanda tanya. Politisi PAN ini berharap, target setoran dividen dalam RAPBN 2016 tidak didasarkan pada tekanan dari Kementerian BUMN kepada semua BUMN terutama yang menerima PMN.

Namun Sungkono menambahkan, bila memang kondisinya memungkinkan untuk menambah dividen tentu tidak masalah. “Jika bisa dimungkinkan, kita tidak memperlmasalahkannya. Apalagi



Anggota Komisi VI DPR RI Sungkono

bila masih ada ruang untuk itu,” imbuhnya dalam raker dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. (MH) FOTO: ANDRI/PARLE/HR

KOMISI I SIAP BAHAS RUU TERKAIT E-COMMERCE



Suasana Raker Komisi I dengan Menkominfo.

Meningkatnya transaksi e-commerce atau perdagangan elektronik di tanah air perlu didukung aturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Undang-Undang Nomor 11/2008 ten-

tang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sejauh ini belum mampu menjangkau sejumlah persoalan termasuk aspek perlindungan data konsumen.

“Melihat pesatnya perkembangan e-

commerce di Indonesia, saya rasa perlu membuat aturan yang sesuai. Sejauh ini kita baru punya UU ITE, yang lebih detail kita belum punya. Kita perlu membahasnya dalam panitia khusus melibatkan komisi terkait,” kata anggota Komisi I Elnino M. Husen Mohi dalam rapat kerja dengan Menkominfo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/15).

Pimpinan sidang Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya menyambut baik usulan ini. Ia menjelaskan produk legislasi terkait e-commerce belum masuk dalam prolegnas prioritas. Menurutnya hal ini perlu disuarakan dalam rapat paripurna agar menjadi perhatian anggota dewan dari komisi terkait lain.

Dukungan yang sama disampaikan anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Evita Nursanty. Ia menilai maraknya perdagangan elektronik produk kecantikan, obat-obatan dan makanan yang beredar di tengah masyarakat tidak diimbangi aspek perlindungan konsumen yang memadai.

“Bagaimana pemerintah melindungi masyarakat yang terlibat dalam penjualan e-commerce seperti ini. Saya mendapat masukan sejumlah produk yang dijual, seperti obat-obatan memiliki efek samping. Apakah ini sudah

tersosialisasi dengan baik?” tekan dia.

Menjawab hal ini Menkominfo Rudiantara menjelaskan pemerintah saat ini sudah menyiapkan *roadmap* terkait penanganan e-commerce di tanah air. *Digital economy* ini menurutnya pasti

akan datang dan tidak bisa dihindarkan. Transaksi tahun lalu sudah mencapai angka lebih dari Rp150 triliun dan akan terus meningkat.

“Kita perlu menyiapkan sejumlah peraturan seperti National Payment Gate-

way, RUU Perlindungan Data Pribadi yang memang belum masuk Prolegnas. Kita sudah mengeluarkan peraturan menteri dan terus melakukan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya. (IKY) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR

UU KEPROTOKOLAN MASIH PERLU SOSIALISASI

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menilai sejumlah pihak belum memahami aturan yang telah ditetapkan dalam UU no.9/2010 tentang Keprotokolan. Ia menyebut masih diperlukan sosialisasi kepada aparat baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Ketika anggota DPR melakukan kunjungan ke daerah, posisi duduknya tidak sesuai bahkan dengan pejabat yang menurut aturan UU no.9/2010 berada di bawahnya seperti dirjen atau bupati. Setelah diberitahu, panitia buru-buru memperbaiki tentu bukan seperti itu yang kita inginkan,” katanya saat rapat pleno BURT di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/15).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga menyebut kebijakan protokoler dalam sejumlah agenda kegiatan bersama menteri terkait, yang belum se-

suai aturan protokoler. “Menteri justru mendapat fasilitas, padahal menurut UU posisinya di bawah anggota dewan,” tutur dia.

Anggota BURT dari Fraksi PDIP Indah Kurnia juga menyampaikan pengalaman ketika harus menjelaskan aturan keprotokolan kepada Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden). Misalnya posisi duduk anggota dewan bukan di belakang presiden tetapi di samping atau pada baris yang sama.

“Bukan kita minta untuk dihormati, tetapi menempatkan pada posisi sesuai aturan yang sudah ada. Seharusnya ini sudah menjadi prosedur tetap yang dipahami aparat terkait, baik di pusat maupun di daerah,” tekan wakil rakyat dari daerah pemilihan Jatim I ini.

Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR Djaka Dwi Winarko yang juga hadir dalam pertemuan tersebut



Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso

menyebut tidak jarang pihak kesetiaan harus *ngotot* menjelaskan tentang aturan perundang-undangan kepada aparat protokol setempat. Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengatakan akan melakukan koordinasi dan siap mendukung langkah sosialisasi UU no.9/2010.

(JAKA/IKY) FOTO: JAKA/PARLE/IW

Masalah Tanah di Lampung Masuk Kategori Merah



Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria bersama Kanwil BPN dan Sekda Prov. Lampung.

Permasalahan tanah di Provinsi Lampung sudah masuk kategori merah. Ini ditandai dengan banyaknya kasus tanah yang rawan konflik. Bahkan, beberapa diantaranya telah menimbulkan korban jiwa.

Demikian ditegaskan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik

(kunspek) Komisi II DPR Ahmad Riza Patria pada pertemuan dengan Gubernur Lampung yang diwakili Sekda Arinal Djunaedi dan Kanwil BPN serta jajarannya di Bandar Lampung, Senin (28/9). Kedatangannya di Lampung, kata Riza, selain untuk menggali permasalahan tanah, juga ada laporan masyarakat yang ingin kasus-kasus tanah bisa segera diselesaikan.

Kehadiran investor penting, tapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam penyelesaian kasus tanah, kepentingan rakyat kecil jangan dikorbankan. Umumnya, lanjut Riza, dalam sengketa tanah, pengusaha selalu menang dan diuntungkan. Sementara rakyat kecil selalu dirugikan. Dan umumnya pula pejabat di instansi manapun tidak sedikit yang pro pengusaha ketimbang pro rakyat.

Politisi Gerindra ini menegaskan bahwa Presiden Jokowi telah mencanangkan program-program pro rakyat dan Dewan juga secara konsisten akan mendukungnya. “Karena kita harus sama-sama, baik pejabat maupun DPR dukung program pro rakyat. Kita diuji menyelesaikan kasus-kasus tanah di Lampung ini,” tegasnya.

Riza mendukung pernyataan Yandri Susanto agar penyelesaian tanah di Lampung ini dijadikan pilot proyek penyelesaian tanah secara nasional. Karena itu pula Riza menegaskan, “Siapapun pengusahanya, siapapun *backing*-nya, dan apapun

risikonya akan kita hadapi. Kalau kita benar, Allah akan berpihak pada kita.” Ditegaskan lagi pihaknya siap hadapi pejabat dan pengusaha yang tidak pro rakyat. (MP) FOTO:MASTUR/PARLE/HR

DPR BERSIAP MENERIMA KUNJUNGAN PRESIDEN ITALIA



Sekjen DPR Winantuningtyastiti menerima delegasi Korps Diplomatic dan Dubes Italia

Presiden Republik Italia dipastikan akan berkunjung ke Indonesia pada 8-10 November 2015. Selain bertemu dengan Presiden Joko Widodo, direncanakan, rombongan orang nomor 1 di Italia itu akan bertandang ke DPR pada 9 November 2015.

Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti usai menerima Tim Pendahulu Pemerintah Republik Italia, yang dipimpin oleh Chief of Diplomatic Protocol Republic of Italia, Riccardo Guarigeia, dan didampingi Duta Besar Italia untuk Indonesia, Federico Failla, di ruang rapat BKSAP DPR, Gedung Nusantara III, Senin (28/09/15) petang.

“Direncanakan Presiden Republik Italia akan berkunjung ke DPR pada 9 November 2015, pukul 12 siang, dan diterima langsung oleh Ketua DPR. Sebelumnya, Presiden Italia akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo terlebih dahulu,” kata Winantuningtyastiti.

Win, panggilan akrab Winantuningtyastiti juga memastikan, pengamanan terhadap Presiden Italia akan diperlakukan sama dengan kunjungan tamu negara lainnya. Standar VVIP akan

diperlakukan, seperti yang dilakukan DPR ketika menerima Presiden Turki dan Perdana Menteri Timor Leste beberapa waktu lalu.

“Walaupun kunjungan di DPR tidak terlalu lama, tapi pengamanan akan tetap sama seperti tamu negara lainnya,” imbuh Win.

Ketika pembahasan topik yang akan dibicarakan oleh kedua negara, sempat muncul beberapa usulan. Walaupun tidak dipastikan secara spesifik, namun topik tentang aspek penguatan kelembagaan, terkait transformasi DPR menuju Parlemen Modern, dipastikan akan menjadi salah satu bahan perbincangan.

“Salah satu pembahasan yakni membangun hubungan baik dengan berbagai negara untuk mendukung Pemerintahan. Sementara untuk antar parlemen, membangun hubungan internasional, yaitu memperkuat institusi dan kerjasama antar parlemen,” jelas Win.

Apalagi, lanjut Win, beberapa waktu yang lalu, Indonesia dan Italia juga sudah meresmikan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB).

Di sisi lain, Win belum bisa memastikan, Ketua DPR akan didampingi siapa saja, karena masih menunggu kepastian delegasi Presiden Italia. Namun dapat dipastikan, Ketua DPR akan didampingi para Wakil Ketua DPR.

“Hal ini sangat tergantung dari delegasi yang menyertai Presiden Italia tersebut. Jika didampingi Menteri Pertanian misalnya, maka akan didampingi Anggota Komisi DPR yang membidangi sektor pertanian,” ujar Win.

Usai menyepakati berbagai agenda kunjungan selama di DPR, Win mengajak rombongan untuk meninjau beberapa lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan. (SF) FOTO:JAKA/PARLE/IW.

DPR Tolak Penghapusan Tunjangan Profesi Guru

Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi X DPR, secara tegas menolak rencana Pemerintah yang akan menghapus Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang akan mulai diberlakukan mulai tahun depan. Rencana ini dianggap tidak sesuai dengan visi misi program Nawa Cita, maupun visi meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Hal ini ditegaskan oleh Anggota

Komisi X DPR Sutan Adil Hendra, saat dikonfirmasi oleh Parlemenaria melalui telepon, Selasa (29/09/15). Sutan belum menemukan alasan yang jelas dari Pemerintah terkait rencana penghapusan TPG ini.

“Apabila Pemerintah akan menghapus Tunjangan Profesi Guru, saya rasa ini tidak sesuai lagi dengan janji-janji Presiden Joko Widodo. Saya tidak dapat



Anggota Komisi X DPR Sutan Adil Hendra

mengakomodir alasan Pemerintah soal rencana ini, karena kita kan ingin meningkatkan mutu pendidikan,” tegas Sutan.

Politikus F-Gerindra ini juga melihat, dengan biaya hidup yang semakin mahal, dan dengan kondisi ekonomi yang kurang bersahabat, dikhawatirkan jika rencana ini direalisasikan, akan mempengaruhi kinerja para pendidik. Bahkan, imbasnya, akan mempengaruhi kualitas pendidikan Indonesia.

“Kita ingin pendidikan semakin baik, jadi kalau TPG dihapuskan, sementara sekarang saja kondisi pendapatan guru kecil, sehingga ada yang mencari pekerjaan sampingan lain, seperti menjadi ojek, dan macam-macam lagi, tetapi kalau ada TPG, saya yakin guru-guru ini akan mencintai pekerjaannya, karena ia mendapat imbalan yang pantas. Jadi Komisi X menolak rencana itu,” papar Sutan.

Politikus asal dapil Jambi ini meng-

ingatkan, penghapusan TPG akan memberikan masalah tersendiri. Ia juga heran, padahal selama ini Komisi X selalu memperjuangkan hak-hak guru agar selalu dapat direalisasikan, namun Pemerintah malah mengurangi hak para guru.

“Ini tidak mencerminkan lagi Nama Citra Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Saya dengan tegas menolak tunjangan profesi guru dihapuskan,” tegas SAH, panggilan akrab Sutan.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya di kesempatan yang berbeda. Riefky menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Guru dan Dosen. UU Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa dalam jangka waktu paling lama 10 tahun sejak berlakunya UU Guru dan Dosen, guru yang belum memiliki sertifikasi pendidik wajib memenuhi sertifikasi pendidik.

“Meroketnya harga kebutuhan

pokok sudah cukup membebani biaya hidup para guru. Jadi, TPG tidak hanya perlu dipertahankan bahkan jika ada mekanisme baru yang bisa menambahkan penerimaan guru pun perlu dipertimbangkan oleh pemerintah,” tegas Riefky.

Politikus F-PD ini mengatakan, serapan anggaran terkait TPG, yang dilaporkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Agustus 2015 baru Rp 2,6 triliun atau 45 persen dari total anggaran Rp 5,8 triliun.

“Hal ini menunjukkan sistem penyaluran tunjangan profesi belum tertata secara baik. Untuk itu perlu diperbaiki sistemnya,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut politikus asal dapil Aceh ini, dari data jumlah guru 3 juta orang, baru 1,5 juta orang atau 52,41 persen yang tersertifikasi. Dalam rencana strategis Kemendikbud target guru yang tersertifikasi sebanyak 56 persen. (SF) FOTO:EKA HINDRA/PARLE

WACANA PEMBENTUKAN PANJA GULA BERGULIR

Neraca gula nasional yang hingga kini tak kunjung jelas, membuat pimpinan dan anggota Komisi VI sempat mengulirkan wacana pembentukan panitia kerja (Panja) gula. Pasalnya, antara kebutuhan gula di dalam negeri dengan kebijakan impor tak seimbang.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mengkritik tajam Menteri Perdagangan Thomas Lembong dalam rapat kerja Senin malam (28/9) menyangkut kebijakan impor gula. Berkali-kali pihaknya meminta data neraca gula sejak dulu, tapi hingga kini tak kunjung jelas. Kemendag belum memberikan data komprehensif soal ini.

Faktanya, impor gula yang pada tahun ini sudah mencapai 2,2 juta ton, telah menyengsarakan petani. Ironis-

nya, target impor itu malah akan ditingkatkan hingga 3,12 juta ton. Dalam raker tersebut politisi Partai Gerindra ini mengatakan, “Kita sudah meminta neraca gula. Tapi tidak ada solusinya. Ini contoh kasus kecil. Kita usulkan kepada Pimpinan untuk tidak tanggung-tanggung membentuk Panja gula supaya jelas dan transparan, apa yang sesungguhnya terjadi.”

Salah hitung atas kebutuhan dan kuota impor gula harus ditelusuri. Masalah gula begitu sensitif, karena ia merupakan komoditas penting setelah beras. Anggota Komisi VI lainnya juga menyambut baik wacana pembentukan Panja gula ini. Dengan Panja ini diharapkan semua fakta dan data terungkap secara jelas, sehingga publik



Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan.

tahu siapa yang bermain-main dengan komoditas penting ini. (MH) FOTO:ANDRI/PARLE/IW.

Timwas Haji Desak Pemerintah RI Kirim Tenaga Ahli Identifikasi

Ketua Tim Pengawas Haji Komis VIII DPR RI, Saleh P. Daulay mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan tenaga ahli ke Saudi guna mempercepat proses identifikasi para Jemaah haji Indonesia yang menjadi korban Tragedi

Mina.

“Dalam pengamatan kami, tenaga ahli Indonesia dalam bidang pengidentifikasian korban yang ada di Saudi masih kurang, sementara jumlah jemaah haji yang menjadi korban di seluruh dunia

mencapai 1.107 orang,” ungkap Saleh melalui pesan singkatnya langsung dari Tanah Suci.

Menurut Saleh, pengiriman tenaga ahli itu menjadi sangat penting seiring dengan nota diplomatik yang dikir-

rimkan pemerintah Indonesia. Salah satunya tentu untuk membuka akses kepada tenaga ahli Indonesia untuk menjalankan tugasnya mengidentifikasi korban musibah Mina. Hal itu akan menjadi sia-sia jika tenaga ahli Indonesia yang ada di Arab Saudi masih sangat kurang.

Selain itu penambahan tenaga ahli identifikasi jenazah menjadi sangat penting seiring pernyataan Menteri Agama dimana masih ada lima kontainer jenazah jemaah haji yang menjadi korban musibah Mina yang belum teridentifikasi. Padahal waktu terus berjalan, dan dikhawatirkan kondisi jenazah



Ketua Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR RI, Saleh P. Daulay

akan semakin sulit teridentifikasi.

Sejauh ini Politisi dari Fraksi PAN ini menilai petugas yang melakukan identifikasi masih mengandalkan aparat TNI dan petugas kesehatan yang jumlahnya sangat terbatas. Belum lagi, kondisi fisik petugas yang ada saat ini kemungkinan sudah terlalu lelah akibat terus bertugas siang dan malam.

Sampai Selasa (29/9) pagi WIB, pihaknya mendapat informasi korban tragedi Mina asal Indonesia yang meninggal sebanyak 46 orang yang terdiri dari 41 jemaah haji dan 5 orang *muqim* (orang Indonesia yang sudah ada di Saudi). (AYU) FOTO:NAEFUROJI/PARLE/HR

UU PENJAMINAN UNTUK PERKUAT PERATURAN PENJAMINAN

Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan (RUU Penjaminan) yang akan dibahas Badan Legislasi DPR RI (Baleg) bersama pemerintah sangat diperlukan untuk memperkuat dasar hukum atas peraturan tentang penjaminan.

“Undang-Undang Penjaminan ini akan menjadi rujukan dalam menyelenggarakan penjaminan dalam perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi,” kata Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo saat memberikan penjelasan tentang RUU Penjaminan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, serta Menteri Hukum dan HAM di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (28/9/2015)

Menurut Firman, dalam struktur perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi (UMKMK) mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis. Karena 99% pelaku ekonomi Indonesia termasuk

dalam kategori UMKMK, dengan penerapan tenaga kerja mencapai 97%.

Seperti diketahui UMKMK menghadapi kendala, lanjut politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala tersebut antara lain adalah permodalan, manajemen, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, pungutan yang tidak jelas dan kemitraan.

“Terhadap kesulitan pelaku UMKMK dalam mendapatkan bantuan pendanaan dalam bentuk kredit tanpa memberikan agunan, lembaga pembiayaan Bank dan Non Bank telah membuat beberapa terobosan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKMK. Namun usaha tersebut belum efektif,” papar anggota Komisi IV DPR RI ini.

Dijelaskan Firman, lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengamankan peralihan kewenangan pengawasan terhadap lembaga penjaminan dari Menteri



Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo.

Keuangan kepada OJK, dan setelah OJK terbentuk, pengaturan mengenai lembaga penjaminan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

“Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dibentuk regulasi terkait dengan penjaminan untuk memberikan kepastian hukum kepada penjamin, terjamin, dan penerima jaminan dalam bentuk undang-undang,” tegas Firman.

(SCI) FOTO:ANDRI/PARLE/IW.

DPR SUKSES PERTAHANKAN WTP KEENAM DARI KEMENTERIAN KEUANGAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan lembaga Tahun Anggaran 2014. Penghargaan yang diraih DPR tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti Swasanani dari Menko Ekuin didampingi Menkeu di Kementerian

Keuangan, Jumat (02/09/2015).

Penghargaan WTP merupakan opini atas audit atas laporan keuangan yang dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini WTP ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan DPR dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti menerima penghargaan WTP dari Menko Perekonomian didampingi Menkeu

kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Sebelumnya, DPR juga mendapatkan penghargaan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) keenam kali secara berturut-turut.

“Penghargaan WTP ini merupakan yang keenam kalinya diterima DPR, penghargaan ini bukan hanya sekedar penghargaan namun sebagai tantangan agar prestasi tersebut tidak turun dan sebagai pemicu untuk tetap dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan bahwa DPR telah menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara baik,” ungkap Win sapaan akrab Sekjen DPR.

“Allhamdulillah untuk keenam kalinya DPR mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan, hal ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan DPR dilakukan secara akuntabel dan transparan,” ungkap Win.

Setiap program yang disusun, tambah Win, harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan tetap memperhatikan akuntabilitasnya. Sehingga, untuk tetap mempertahankannya, Win selalu memberikan pengarahan dan setiap bulannya melakukan konsolidasi mengenai laporan keuangan. “Semoga penghargaan ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan oleh DPR,” tutup Win. (SKR) FOTO:RIZKA/PARLE/HR

Baleg dan Pemerintah Sepakati Jadwal Pembahasan RUU Penjaminan

Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dan pemerintah menyepakati jadwal pembahasan dan mekanisme pembahasan RUU tentang Penjaminan. Jadwal acara bersifat fleksible dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. RUU Penjaminan akan mulai dibahas DPR bersama pemerintah pada Kamis (1/10/2015) ini. Berdasarkan Surat Presiden, pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri Hukum dan HAM.

Kesepakatan tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Baleg dengan Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri Hukum dan HAM dipimpin Ketua Baleg Sareh Wiyono di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (28/9/2015)

Selain menyepakati jadwal acara dan mekanisme pembahasan RUU Penjaminan, rapat tersebut juga menyepakati 176 Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang bersifat tetap dari 512 DIM yang disampaikan pemerintah. Pembahasan DIM lainnya akan di bahas di tingkat Panitia Kerja (Panja).

“DIM yang bersifat tetap dapat langsung disetujui dalam Raker ini dengan catatan dapat berubah apabila terkait dengan substansi yang mengalami pe-

rubahan. Sedangkan pembahasan DIM lainnya akan dibahas di tingkat Panja mulai tanggal 1 Oktober 2015,” terang Sareh.

Dijelaskan Sareh, dari 512 Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang disampaikan pemerintah dikelompokkan menjadi DIM yang bersifat tetap sebanyak 176 DIM, DIM dengan perubahan substansi sebanyak 56 DIM, DIM dengan penambahan substansi sebanyak 103 DIM, DIM dengan perbaikan redaksional sebanyak 77 DIM, dan DIM yang dihapus sebanyak 100 DIM.

Dalam kesempatan tersebut, Sareh mengharapkan Baleg dan pemerintah dapat menyelesaikan pembahasan RUU Penjaminan ini dalam waktu sebagaimana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, politisi Partai Demokrat ini menyampaikan bahwa Rapat-rapat Panja Pembahasan RUU Penjaminan akan dipimpin Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mewakili pemerintah berharap dengan waktu yang tersedia dan dengan usaha bersama DPR dan pemerintah bisa menyelesaikan pembahasan RUU ini tepat waktu dan



Ketua Baleg DPR Sareh Wiyono

dengan kualitas yang sangat baik. “Mudah-mudahan RUU ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, bangsa dan negara,” kata Bambang.

Ia menginformasikan, bahwa Panja pemerintah akan dipimpin Dirjen Pembinaan dan Pengelolaan Resiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, dan tentunya juga akan melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Hukum dan HAM. (SC) FOTO:ANDRI/PARLE/IW.

KEJAYAAN LAUT INDONESIA MELALUI POROS MARITIM

Anggota Komisi V DPR RI Anton Sihombing menegaskan jika Indonesia harus mengembalikan kejayaan laut melalui poros maritim dunia dan sistem tol laut, karena seluruh barang-barang atau 90 persen melewati laut, dan 60 persennya melalui Indonesia.

“Tapi, apa yang didapat oleh Indonesia? Kan tidak ada. Kita kalah dari Singapura, Philipina, dan Thailand. Karena itu sejalan dengan program kemaritiman pemerintahan Jokowi-JK, semua harus bertekad untuk mengembalikan kejayaan laut seperti pernah dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit,” kata Anton dalam keterangannya pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (28/9).

“Dulu Presiden Soekarno kerjasama dengan banyak elemen masyarakat dan kemaritiman mengalami kemajuan. Tapi kini melenceng dan pelayaran tidak dibangun secara optimal. Sementara Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti hanya fokus pada *illegal fishing* (pencurian ikan), maka kita harus tingkatkan



Anggota Komisi V DPR Anton Sihombing

peran nahkoda dan para nelayan agar mandiri, dan kita akan berjuang untuk kekuatan laut itu melalui INNI (Ikatan Nahkoda Niaga Indonesia),” tambah Anton

Anton bertekad memajukan pelay-

aran termasuk nelayan rakyat, agar mereka bisa bekerja dengan baik, terlindungi karena banyak campur tangan dari luar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Langkah Susi Pudjiastuti hanya sebagai shock therapy saja, dan perannya harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

Apalagi kini kata Anton, terjadi persaingan yang tidak sehat antara nahkoda dari Indonesia dan luar negeri. Di mana, gaji nahkoda Indonesia rendah tapi sebaliknya dari luar negeri gajinya cukup besar. Hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi, sehingga harus ada solusi untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut.

Indonesia Maritime And Ocean (IMO) Watch, tentu mendukung penuh rencana pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan tol laut. Sebab tol laut penting untuk menciptakan poros maritim yang mendukung kemajuan pelayaran nasional sehingga mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. “Tol laut harus segera direalisasikan. Kita juga mendukung penuh langkah-langkah Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli,” kata Anton Sihombing. (NT) FOTO:RIZKA/PARLE/HR

DPR BERSAMA GOPAC SATUKAN VISI HADANG KORUPSI KAKAP



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf didampingi Dwie Aroem Hadiatie, dan Hamdani dalam Jumpa Pers jelang Sidang GOPAC ke-6

DPR RI menjadi tuan rumah Sidang Umum keenam GOPAC (Global Conference of Parliamentarians Against Corruption) yang dijadwalkan berlangsung di Yogyakarta 5-8 Oktober 2015. Or-

ganisasi global yang didukung 170 orang anggota parlemen antikorupsi dari 50 negara, akan memberikan perhatian pada penanganan *grand corruption* (korupsi kakap) di bawah tema; ‘Bring-

ing Perpetrators of Grand Corruption to Justice for A Sustainable World where All Citizens Can Live in Prosperity and Equity’.

Sebelumnya dalam forum yang berlangsung di Panama, GOPAC telah membuat resolusi agar UNCAC (Konvensi PBB untuk Melawan Korupsi) dapat mengakui korupsi kakap sebagai salah satu kejahatan hak asasi manusia. Diusulkan pula agar proses peradilan korupsi dalam skala besar ini diselesaikan di Internasional Criminal Court (Pengadilan Kriminal Internasional).

“Keterlibatan DPR dalam sidang GOPAC kali ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap resolusi tersebut dan juga sebagai tempat untuk mempelajari dan memperdalam mekanisme yang akan diajukan GOPAC,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/15).

Dalam sidang di Yogyakarta ini lanjutnya, DPR ingin menggali lebih dalam mengenai hal tersebut. Sejumlah referensi menunjukkan, membawa proses penuntutan kejahatan korupsi ke level internasional memiliki beragam konsekuensi baik politis maupun legal.

Dalam aspek legal misalnya, kerangka internasional yang seperti apa yang dibutuhkan untuk proses tersebut? Apakah melalui Mahkamah Pidana Internasional atau Pengadilan Internasional yang baru?

“Ini yang akan kita bahas secara khusus dalam sesi kedua konferensi bersama pakar hukum dari Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana dan John Hyde, Ketua GOPAC Oceania,” tutur Fadli yang juga menjabat Ketua GOPAC National Chapter Indonesia. Bahasan lain dalam sesi diskusi diantaranya tentang ‘Tools and Mechanism to Build Anti-corruption Prevention System’ dan ‘Paralysing Grand Corruption and Recovering Stolen Assets’.

Bicara pada kesempatan berbeda Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf mengatakan Indonesia berhasil memasukkan persoalan biaya tinggi dalam demokrasi -- ‘The High Cost of Insti-

tutionalizing Democracy’ sebagai salah satu bahasan sesi diskusi. Seorang politisi seringkali dipengaruhi oleh kebutuhan untuk meminta sumbangan dari kepentingan khusus untuk membiayai kampanye pemilu yang mahal dan kemudian memiliki rasa kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada para penyumbang.

“Usulan DPR ini dibicarakan pada panel keenam. Kita akan membahas sisi buruk dari demokrasi dalam hal kampanye politik dengan biaya yang tinggi dan juga mencari kemungkinan pilihan dalam membuat proses demokrasi lebih efisien. Kita harapkan ini juga akan menjadi forum pembelajaran dan sebagai tempat berbagi praktik terbaik bersama oleh anggota GOPAC,” paparnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menyebut akar korupsi parlemen adalah cara pembiayaan parpol. Ada banyak pilihan kebijakan yang menarik

untuk dipelajari. Di beberapa negara, misalnya Australia, parpol diijinkan untuk berbisnis. Di negara lain pembiayaan parpol juga dapat ditelusuri dari data pembayar pajak. Sedangkan di Indonesia pernah berkembang wacana pembiayaan parpol dari APBN.

Sidang Umum keenam GOPAC juga menghadirkan sejumlah organisasi yang menjadi partner seperti PBB, IDB termasuk juga mendengar masukan dari lembaga antirasuah Indonesia - KPK dalam sesi diskusi yang mengusung tema, ‘Menyukkseskan Tantangan SDG: Meningkatkan Efisiensi Bantuan Pembangunan Melalui Pengawasan Parlemen. GOPAC, dalam kemitraan dengan Bank Pembangunan Islam dan United Nations Development Programme (UNDP), meluncurkan sebuah proyek untuk mendukung anggota parlemen meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan dana bantuan pembangunan. (IKY) FOTO: DENUS/PARLE/HR

Daya Beli Menurun, Rakyat Perlu Kebijakan Konkrit



Anggota Komisi I DPR RI Djoko Udjianto

Anggota Komisi I DPR RI Djoko Udjianto menyampaikan keprihatinan atas lesunya perekonomian yang berakibat menurunnya daya beli masyarakat. Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah konkrit menggenjot sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Hasil pantauannya di daerah melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan anjloknya nilai tukar terha-

dap dolar Amerika Serikat hingga titik terendah selama 17 tahun ini menghantam para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Saya mencermati sejumlah laporan, para pengusaha UMKM ini mengeluhkan penurunan daya beli masyarakat yang membuat produknya tidak laku terjual,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/15).

Wakil Ketua Badan Anggaran ini mengapresiasi program-program pemerintah yang berhasil mengundang banyak investasi asing seperti pembangunan pembangkit listrik 35000 MW. Namun program itu baru dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka waktu panjang dan menengah.

“Sekarang masyarakat dihadapkan pada basic needs yang sifatnya sangat mendesak dan urgen. Masyarakat saat ini tidak butuh program muluk-muluk tapi yang konkrit, yang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Itu tidak dapat ditunda-tunda dalam hitungan tahun atau bulan, tetapi harus segera direalisasikan paling lambat dalam hitungan hari,” tekan dia.

Selain itu, politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga mengingatkan bahwa

beberapa janji program Jokowi JK adalah menciptakan ketahanan pangan, swasembada pangan, pembangunan yang berbasis dan mengutamakan masyarakat pedesaan.

“Sayangnya, kebijakan pembangunan yang dimulai dari desa tersebut belum terlaksana dan terlihat hasilnya. Kalau Jokowi masih suka blusukan, dia pasti akan melihat kehidupan masyarakat di daerah semakin susah, daya beli sangat rendah, lapangan kerja tidak ada,” tutur Djoko.

Pemerintah menurutnya jangan terlalu sibuk berapologi, menyalahkan faktor eksternal sebagai biang kerok dari penurunan daya beli, seperti perlambatan ekonomi dunia, kondisi geopolitik nasional yang tidak kondusif maupun kebijakan beberapa negara untuk menyelamatkan perekonomian masing-masing.

“Semua orang paham ada banyak faktor dalam penguatan dolar saat ini. Namun ketidakmampuan pemerintah dalam menahan laju pelemahan rupiah yang terus anjlok menunjukkan tidak adanya perencanaan dan manajemen ekonomi fiskal yang baik,” pungkas dia.

(IKY) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR

Irtama Sekjen DPR Terima Kunjungan PPRA LIII Lemhanas



Irtama Setjen DPR RI, Setyanta Nugraha menerima kunjungan peserta PPRA LIII Lemhanas

Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR RI, Setyanta Nugraha menerima kunjungan peserta Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) LIII Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Senin (28/9) di ruang rapat Sekjen DPR RI.

“Hampir setiap tahun kami (Setjen) DPR RI menerima kunjungan dari Lemhanas, dimana salah satu program pembelajaran disana adalah Sismenas (Sistem Manajemen Administrasi Nasional) yang melibatkan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di legislatif, peserta berusaha mendapat masukan, informasi dan data berkenaan dengan bidang tugas DPR RI sendiri,” jelas Setyanta Nugraha atau yang akrab disapa Toto.

Dalam sistem manajemen nasional proses pengambilan keputusan dan kebijakan senantiasa melibatkan proses-proses yang ada di DPR, di-

mana DPR memiliki tiga fungsi yang diembannya, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, dan terakhir fungsi dukungan terhadap pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri atau yang disebut dengan fungsi diplomasi.

Pada kesempatan itu juga digunakan Toto untuk ikut memberikan informasi terkait perubahan beberapa nomenklatur di DPR maupun di Setjen DPR. Misalnya tentang perubahan Badan Kehormatan DPR menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), serta ditiadakannya lembaga dan alat kelengkapan dewan BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, dimana fungsi-fungsi yang diembannya itu sekarang diserahkan ke komisi-komisi dan AKD (alat kelengkapan dewan).

“Kami juga mencoba memberikan pelurusan-pelurusan dari penyebutan nomenklatur kegiatan DPR yang sering

kali salah tafsir, seperti rapat kerja (Raker), rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang sering kali diganti-ganti. Padahal kalau rapat kerja yaitu rapat dengan level Menteri atau Kepala Badan, RDP merupakan rapat anggota DPR dengan pejabat eselon satu, sementara RDPU merupakan rapat dengar pendapat dengan masyarakat, perorangan, kelompok masyarakat atau asosiasi, ini yang sering salah penyebutan di Lemhanas,” jelas Toto.

Sementara itu, Pimpinan rombongan PPRA LIII, Kisno Haryo mengatakan bahwa ini merupakan program pilihan PPRA angkatan LIII dalam rangka mendalami tugas, fungsi, dan peranan dari lembaga – lembaga negara baik kementerian maupun lembaga-lembaga lainnya.

Kunjungan dimaksudkan sebagai pembekalan, ketika mereka melakukan sismenas. Dalam kegiatan yang akan digelar pada akhir Oktober mendatang, peserta akan melakukan simulasi terkait tugas dan fungsi dari Kementerian/Lembaga termasuk DPR RI.

“Pemilihan DPR menjadi salah satu tempat yang disinggahi oleh Lemhanas karena DPR mempunyai fungsi sentral di dalam kehidupan negara yang menganut sistem demokrasi. Dimana DPR sebagai salah satu lembaga pemegang kekuasaan pemerintahan negara, pemegang kekuasaan legislatif dan lembaga yang akan mengawasi jalannya pemerintahan. Didalam sistem manajemen nasional kita, DPR mempunyai peranan sangat sentral karena akan mengawasi dua kekuasaan lainnya yaitu yudikatif dan eksekutif,” ungkap Kisno dari Lemhanas. (AYU) FOTO:NAEFURODJI/PARLE/IW.

PMN KLOTER KEDUA DIAJUKAN, KOMISI VI MINTA AUDIT

Penyertaan modal negara (PMN) kloter kedua kembali diajukan Kementerian BUMN untuk RAPBN 2016. Anggaran PMN yang diusulkan kali ini sebesar Rp31,32 triliun yang terdiri dari 28,75 triliun berupa dana tunai dan Rp2,568

triliun non tunai.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (1/10), Menteri BUMN Rini Soemarno memaparkan sejumlah BUMN yang mendapat suntikan dana PMN. Di bidang infrastruktur, Utama

Karya mendapat Rp3 triliun, Wijaya Karya Rp3 triliun, PT. Pembangunan Perumahan Rp2 triliun, dan Jasa Marga Rp1,25 triliun. Sementara untuk non tunai diberikan kepada Marta Karya Rp32,15 miliar dan Perumnas Rp235,41



Anggota Komisi VI DPR Lili Asjudiredja

milyar.

Di sektor konektivitas, Angkasa Pura II juga mendapat PMN sebesar Rp2 triliun dan Peln mendapat non tunai sebesar Rp564,8 miliar. Untuk program kedaulatan pangan Perum Bulog diusulkan mendapat Rp2 triliun, PT. Perdagangan Indonesia Rp500 miliar,

Rajawali Nusantara Indonesia non tunai Rp692,5 miliar, PT.Perikanan Nusantara non tunai Rp29,4 miliar, PTPN I dan PTPN VIII non tunai masing-masing Rp25,05 miliar dan Rp32,78 miliar.

Di sektor kedaulatan energi PLN mendapat tunai Rp10 triliun. Untuk pendanaan mikro dan kemandirian keuangan PT. Asuransi Indonesia Utama mendapat tunai Rp500 miliar, PT.Bahana PUI Rp500 miliar, PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo masing-masing mendapat Rp500 miliar. Sementara untuk penguatan teknologi, Krakatau Stell mendapat PMN tunai dan non tunai sebesar Rp1,5 triliun dan non tunai Rp956,49 miliar.

PNM juga diberikan kepada PT.Industri Kereta Api Rp1 triliun, PT Barata Indonesia Rp500 Miliar. Rini juga menjelaskan, seiring pengajuan PMN kloter kedua ini, Kementerian yang dipimpinnya juga mengusulkan dividen dalam RAPBN 2016 sebesar Rp34 triliun. Penetapan dividen ini, kata Rini, telah

mempertimbangkan tingkat kemampuan perusahaan serta kemampuan pendanaan berdasarkan rasio keuangan.

Anggota Komisi VI DPR Lili Asjudiredja mempertanyakan PMN kloter pertama yang hingga kini belum tuntas pertanggungjawabannya. Bahkan, katanya, sejumlah BUMN ada yang belum menerima PMN yang sudah disahkan dalam APBN 2015. Kini, PMN kloter kedua untuk RAPBN 2016 sudah diusulkan lagi.

Sementara Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus untuk dana tambahan PMN dalam bentuk non tunai sebesar Rp2,568 triliun dalam RAPBN Tahun 2016. "Kami akan meminta BPK untuk melakukan audit. Audit tersebut menjadi dasar bagi Komisi VI untuk mengambil keputusan atas usulan tambahan PMN tersebut." (MH) FOTO:IWAN

ARMANIAS/PARLE/HR

Semangat Restorasi Warnai HUT F-Partai Nasdem DPR

Semangat restorasi yang selalu menjadi jargon Partai Nasdem membahana tepat di acara ulang tahun Fraksi Partai Nasdem yang pertama di DPR. Ketua Fraksi Nasdem Victor Bungtilu Laiskodat menegaskan, walau jumlah anggota fraksinya sedikit, hanya 36 orang, tapi secara kualitas cukup memberi warna di DPR RI.

Dalam sambutannya, Victor menyatakan, anggota F-Nasdem harus menjadi motor penggerak untuk restorasi Indonesia dari gedung parlemen. Tak boleh mencari kekayaan dengan cara tidak terhormat. "Kekayaan yang diperoleh dengan tidak hormat tidak mendatangkan apa-apa. Malah akan mendatangkan kemurkaan dan mempermalukan diri sendiri."

Victor juga mengutip seruan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang disebutnya sebagai Bapak Restorasi, agar terus berjuang untuk restorasi Indonesia. Anggota F-Nasdem yang 36 ini, tak perlu terjebak dalam praktik politik dinasti. Tantangan ke depan masih terlalu banyak untuk dihadapi.

"Kehadiran kita di DPR RI ini menjadi tantangan bagi kita semua. Sebagai kelompok manusia Indonesia yang ingin merubah dan merestorasi nilai-nilai kebangsaan, kita diperingatkan dengan situasi yang sangat berat. Saya mengajak seluruh politisi di Senayan, seluruh fraksi di DPR RI untuk mulai bekerja sama mengembalikan harkat dan martabat DPR RI sebagai lembaga yang terhormat."

Acara HUT Fraksi Nasdem dihadiri para anggota F-Nasdem DPR RI. Usai pembukaan, acara dilanjutkan melihat foto-foto aktivitas para anggota F-Nasdem selama bekerja di DPR RI. Pameran fotonya sendiri berlangsung dari tanggal 1 hingga 9



Ketua F-Partai Nasdem Victor Bungtilu Laiskodat memotong tumpeng HUT pertama

Oktober 2015. Acara ini merupakan awal dari rangkaian acara perayaan ulang tahun yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Victor. di hari yang sama juga digelar peluncuran buku 70 tokoh Indonesia di Hotel Borobudur.

Setelah itu, pada tanggal 8-9 Oktober digelar Turnamen Bulutangkis PSP Cup di lapangan bulutangkis DPR. Turnamen ini akan dihadiri legenda pemain ganda Indonesia Ricky Subagja dan Rexy Mainaki. (MH)FOTO:IWAN ARMANIAS/PARLE/IW.

KOMISI V DPR TINJAU JALAN TOL DI JAKARTA



Tim Komisi V tinjau sejumlah ruas jalan tol di Jakarta

Tim Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana Adia, Rabu (30/1), meninjau sejumlah jalan tol di Jakarta guna memantau operasional dan rencana pengembangan jalan tol di sekitar Jabodetabek serta mencari solusi bagaimana mengatasi problematika kemacetan di dalam tol.

Rombongan Tim Komisi V bergerak dari Gedung DPR RI memulai perjalanan menuju pintu tol Kayu Besar I-Cengkareng via pintu Tol Slipi menuju tol Sedyatmo dan masuk ke arah jalur Tol Lingkar Barat, selanjutnya tim melanjutkan perjalanan ke Tol JORR-TB Simatupang via jalur Tol menuju simpang pembagi arah Serpong-Pondok Indah, dan singgah di lokasi rencana pembangunan simpang susun Antasari (Jalan Tol ruas Depok-Antasari) yang bersinggungan dengan ruas tol JORR untuk mengetahui upaya penyelesaian permasalahan aksesibilitas tol JORR.

Setelah itu, tim melanjutkan perjalanan dari tol JORR-TB Simatupang menuju kantor pusat Jasa Marga via tol Pondok Pinang-TMII, untuk menggelar

pertemuan guna mencari masukan dari BPJT dan operator jalan tol. Usai pertemuan, mengakhiri kunjungannya, tim melanjutkan peninjauan ke tol Priok, untuk melihat di lapangan terkait pembangunan tol Priok.

Sebelumnya saat diwawancarai Parlemenaria Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia menjelaskan seperti yang diketahui bersama Jakarta dan sekitarnya ini, setiap hari kemacetan semakin luar biasa, oleh karena itu DPR meminta ada solusi yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan infrastruktur jalan tol.

Menurut Yudi, hampir setiap hari banyak keluhan dari masyarakat baik melalui medsos dan media lainnya, mengenai kemacetan dan sarana lain-lainnya tentang jalan tol. "Daerah ini hampir setiap hari kita lalui, dan kami banyak mendengar komplain dari masyarakat, oleh karena itu kunjungan spesifik kali ini ingin mengetahui bagaimana perencanaan kedepan tentang bagaimana mengatasi problematika dan apa saja yang dihadapi," terang

Yudi politisi dari PKS ini.

Selanjutnya, tambah Yudi, mengenai rencana pengembangan ruas jalan tol, dirinya berharap agar lima tahun ke depan bisa dituntaskan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan

Dan menurut Yudi, DPR akan memberikan dukungannya terkait pembangunan jalan tol, "Kalau ada ruas jalan tol yang memang tidak menguntungkan kami siap memberikan dukungan apakah itu sebagian melalui APBN dan kalau tidak menguntungkan secara bisnis kita bantu agar investor bisa untung masuk," tegasnya.

Sementara itu, anggota tim kunjungan spesifik Komisi V DPR Rendy Lamajido mengatakan kunjungan DPR kali ini ke sejumlah jalan tol untuk mengecek keberadaan tol di DKI Jakarta, yang pertama ingin di lihat, kata Rendy, adalah standar minimal.

"Yang pertama yang ingin kami lihat adalah standar minimal itu terpenuhi atau belum, kedua, sejauhmana kepadatan tol-tol dalam maupun tol luar kita, dan kita berharap nanti ada pemikiran terhadap DKI Jakarta ini bisa tercover dalam persoalan transportasi masyarakat Jakarta pada umumnya," jelas Rendy

Pada kesempatan pertemuan dengan jajaran Kementerian PU dan operator jalan tol, Rendy juga mengingatkan kepada *stakeholder* jalan tol untuk memperbaiki standar pelayanan minimum, "Kalau dilihat, hampir di seluruh jalan tol standar pelayanan minimumnya masih sangat minim, terutama pada persoalan maintenance seperti masih kurangnya rambu-rambu jalan dan lain-lainnya," katanya.

Rendy juga menyoroti mengenai penumpukan kendaraan di *gate connection* dimana kerap terjadi penumpukan kendaraan, "Saya melihat disini ada beberapa gate atau pintu gerbang yang boleh dikata jalur yang lebar menuju suatu jalur yang sempit, ini juga yang perlu diperhatikan dengan baik, dan saya berharap *gate-gate* ini dicarikan solusinya," jelas Rendy politisi PDIP ini.

(NT) FOTO: RIZKA/PARLE/HR



Ketua DPR RI Setya Novanto bersama Presiden RI Joko Widodo serta sejumlah pejabat Negara mengunjungi Museum Pancasila Sakti di Lubang Buaya usai upacara Hari Kesaktian Pancasila, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2015)
Foto : Denus, Jaka/Parle/HR



Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman memimpin rapat dengan Plt Gubernur Prov. Sumatera Utara terkait persiapan Pilkada serentak, Sumut, Selasa (29/9/2015) Foto : Agung/ Parle/HR



Kunjungan Spesifik Komisi V DPR memantau operasionalisasi dan pembangunan jalan tol di ruas Tol Priok, Jakarta Utara, Rabu (30/9). foto: Rizka/Parle



Pimpinan dan Anggota Baleg didampingi wakil dari Mabes Polri, pejabat Setjen DPR, MPR, DPD meninjau sistem keamanan kompleks gedung Parlemen, Rabu (30/9/2015) Foto : Andri/Parle/HR